

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Perpustakaan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang penerapan sanksi administratif, tujuan kebijakan tersebut, serta bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaannya. Wawancara juga dilakukan kepada pustakawan guna mendapatkan informasi teknis mengenai mekanisme pemberian sanksi, jenis pelanggaran yang sering terjadi, tingkat kepatuhan pemustaka, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan. Selain itu, wawancara dengan pemustaka dilakukan untuk menggali pengalaman langsung mereka terkait sanksi administratif, pemahaman terhadap tata tertib perpustakaan, serta pengaruh sanksi terhadap perubahan perilaku disiplin mereka.

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap kunjungan lapangan. Pada tahap pertama, peneliti melakukan observasi awal terhadap kondisi lingkungan perpustakaan, sistem layanan sirkulasi, serta pelaksanaan tata tertib yang berlaku. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai mekanisme peminjaman dan pengembalian buku, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta proses pemberian sanksi administratif kepada pemustaka. Pada tahap ini, peneliti juga mulai mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada tahap kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Perpustakaan dan pustakawan. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk menggali informasi secara rinci mengenai proses perumusan kebijakan sanksi, bentuk sanksi yang diterapkan (seperti teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan layanan, dan denda keterlambatan), serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Peneliti juga melakukan pencatatan dan dokumentasi data untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi.

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemustaka yang pernah maupun sedang dikenai sanksi administratif. Dalam proses ini, peneliti menanyakan tingkat pemahaman mereka terhadap aturan perpustakaan, alasan terjadinya pelanggaran, serta apakah sanksi yang diberikan memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku menjadi lebih disiplin. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap perilaku pemustaka dalam kegiatan peminjaman dan pengembalian buku guna melihat secara langsung tingkat kepatuhan terhadap tata tertib.

Selain itu, peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa buku tata tertib perpustakaan, arsip data pelanggaran, laporan keterlambatan pengembalian buku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif di MAN 2 Kota Banjarmasin. Dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Secara keseluruhan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual mengenai efektivitas

penerapan sanksi administratif serta pengaruhnya terhadap peningkatan kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kebijakan perpustakaan yang lebih edukatif, konsisten, dan berorientasi pada pembentukan karakter disiplin siswa

1. Gambaran Efektifitas Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pemustaka

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Kebijakan ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan layanan sirkulasi yang bertujuan menciptakan ketertiban, tanggung jawab, serta kesadaran siswa dalam memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan. Kehadiran sanksi administratif tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter disiplin bagi peserta didik.

Secara umum, sanksi administratif yang diterapkan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan hak layanan seperti penangguhan peminjaman buku dalam jangka waktu tertentu, serta denda keterlambatan pengembalian koleksi. Penerapan sanksi ini dilakukan berdasarkan tata tertib perpustakaan yang telah disosialisasikan kepada siswa. Setiap pelanggaran yang terjadi, khususnya keterlambatan pengembalian buku, dicatat oleh pustakawan sebagai bagian dari administrasi layanan sirkulasi.

Dari segi pelaksanaan, sistem sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin telah memiliki prosedur yang cukup terstruktur. Ketika siswa terlambat mengembalikan buku, pustakawan terlebih dahulu memberikan teguran dan mengingatkan kewajiban pengembalian. Apabila keterlambatan terus berulang, maka diberlakukan pembatasan layanan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi administratif menunjukkan dampak terhadap perilaku sebagian pemustaka. Siswa yang pernah dikenai sanksi cenderung lebih berhati-hati dalam meminjam dan mengembalikan buku tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi memiliki fungsi preventif dan edukatif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran yang terjadi secara berulang, yang mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi belum sepenuhnya optimal dan masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat kesadaran pribadi, kesibukan siswa, atau kurangnya pemahaman terhadap aturan.

Selain sebagai instrumen penegakan aturan, sanksi administratif juga berperan dalam menjaga ketersediaan koleksi agar dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh siswa di MAN 2 Kota Banjarmasin. Dengan adanya pengembalian buku yang lebih tertib, sirkulasi koleksi menjadi lebih lancar dan layanan perpustakaan dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin merupakan bagian dari strategi manajerial dalam membentuk budaya disiplin di lingkungan madrasah. Meskipun belum sepenuhnya

menghilangkan pelanggaran, kebijakan ini telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka terhadap tata tertib perpustakaan. Upaya penguatan sosialisasi, konsistensi penerapan, serta pendekatan edukatif yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sanksi administratif tersebut.

2. Proses Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pemustaka yang Melanggar Aturan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan, Ibu Fatiah mengatakan bahwa:

“Kami menerapkan sanksi administratif sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mendidik siswa agar lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kami ingin siswa tidak hanya datang untuk meminjam buku, tetapi juga memahami bahwa setiap hak yang mereka terima ada kewajiban yang harus dipenuhi, seperti mengembalikan buku tepat waktu dan menjaga koleksi dengan baik. Sanksi yang kami terapkan bertahap. Biasanya dimulai dari teguran lisan jika ada keterlambatan pengembalian buku. Jika masih mengulang, maka diberikan teguran tertulis atau pembatasan hak layanan, misalnya tidak diperbolehkan meminjam buku untuk sementara waktu. Untuk keterlambatan tertentu juga diberlakukan denda sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Semua itu sudah tercantum dalam tata tertib perpustakaan dan disosialisasikan kepada siswa sejak awal.

Alhamdulillah, setelah penerapan sanksi ini berjalan, ada perubahan yang cukup terlihat. Banyak siswa yang menjadi lebih berhati-hati dan berusaha mengembalikan buku sebelum jatuh tempo. Mereka juga mulai lebih sadar pentingnya menjaga koleksi agar tidak rusak atau hilang. Memang masih ada beberapa yang terlambat, biasanya karena lupa atau alasan tugas yang menumpuk, tetapi secara umum tingkat keterlambatan sudah lebih terkendali dibanding sebelumnya.

Kami juga terus melakukan pendekatan persuasif. Setiap ada pelanggaran, pustakawan tidak langsung memberikan sanksi tanpa penjelasan, tetapi terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin. Dengan cara ini, siswa tidak merasa tertekan, melainkan memahami bahwa aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama. Karena bagaimanapun juga, perpustakaan adalah fasilitas bersama yang harus dijaga.

Dengan adanya penerapan sanksi administratif ini, jumlah pelanggaran berangsur menurun dan sirkulasi buku menjadi lebih tertib. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kelancaran layanan di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin. Harapannya, kedisiplinan yang terbentuk di perpustakaan juga dapat terbawa dalam kehidupan belajar siswa sehari-hari, sehingga tidak hanya tertib dalam meminjam buku, tetapi juga memiliki karakter tanggung jawab yang lebih kuat”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan dan pustakawan di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif merupakan bagian dari strategi pengelolaan layanan untuk meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Kebijakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa agar lebih bertanggung jawab dalam meminjam, mengembalikan, serta menjaga koleksi perpustakaan. Penerapan sanksi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana edukatif dalam membentuk karakter disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap fasilitas bersama.

Sanksi administratif yang diberlakukan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan hak peminjaman sementara, serta denda keterlambatan pengembalian buku. Prosedur ini diterapkan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Siswa yang terlambat mengembalikan buku terlebih dahulu diberikan peringatan, kemudian dikenakan sanksi lanjutan apabila pelanggaran dilakukan berulang kali. Aturan tersebut telah disosialisasikan melalui tata tertib perpustakaan sehingga setiap pemustaka memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran.

Adanya penerapan sanksi administratif ini terbukti memberikan dampak

¹⁶ Hasil Wawancara Ibu Fatiah Kepala Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin pada hari Selasa, 20 Januari 2026 Jam 13:00.

terhadap perilaku pemustaka. Sebagian besar siswa menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola waktu peminjaman dan berusaha mengembalikan buku sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Tingkat keterlambatan relatif menurun dibandingkan sebelum aturan ditegakkan secara konsisten. Meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran, umumnya disebabkan oleh faktor lupa atau kesibukan tugas sekolah, namun secara keseluruhan kedisiplinan siswa menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa sistem pencatatan pelanggaran dan pemberian sanksi telah berjalan cukup tertib dan terstruktur. Pustakawan tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin dalam menjaga kelancaran layanan. Hal ini menjadikan penerapan sanksi administratif tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan pembinaan.

Demikian, penerapan sanksi administratif di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin berkontribusi dalam menciptakan budaya tertib di perpustakaan. Kebijakan ini membantu memperlancar sirkulasi koleksi, menjaga ketersediaan bahan pustaka bagi seluruh siswa, serta membentuk karakter tanggung jawab yang selaras dengan tujuan pendidikan madrasah.

3. Strategi Pustakawan Terhadap Upaya Penerapan Sanksi Administratif

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Perpustakaan Man 2 Kota Banjarmasin, Ibu Fatiah mengatakan bahwa:

“Salah satu upaya yang kami lakukan dalam mendukung penerapan sanksi administratif yaitu dengan melakukan sosialisasi secara aktif kepada siswa. Kami menyampaikan informasi melalui berbagai cara, misalnya saat

kegiatan orientasi siswa baru, melalui wali kelas, serta pemberitahuan langsung ketika siswa datang ke perpustakaan. Selain itu, kami juga memasang tata tertib dan ketentuan sanksi di papan pengumuman agar dapat dibaca oleh seluruh pemustaka.

Kami menempelkan banner atau lembar informasi di area yang mudah terlihat, seperti di dekat meja layanan sirkulasi, sehingga siswa mengetahui batas waktu peminjaman, besaran denda keterlambatan, serta konsekuensi jika melanggar aturan. Dengan begitu, mereka tidak merasa tiba-tiba dikenai sanksi karena semuanya sudah diinformasikan sejak awal.

Selain pemberitahuan secara tertulis, pustakawan juga sering mengingatkan secara langsung ketika siswa melakukan peminjaman buku, terutama terkait tanggal jatuh tempo pengembalian. Jika diperlukan, kami juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyampaikan pengumuman kepada siswa yang memiliki keterlambatan cukup lama.

Semua upaya tersebut dilakukan agar penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin berjalan secara transparan dan dipahami oleh seluruh siswa di MAN 2 Kota Banjarmasin. Dengan adanya sosialisasi yang jelas dan terbuka, diharapkan siswa menyadari bahwa aturan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan demi terciptanya layanan perpustakaan yang tertib dan nyaman.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemustaka, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengetahui adanya penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pustakawan dan pihak sekolah. Informasi mengenai tata tertib, batas waktu peminjaman, serta konsekuensi keterlambatan disampaikan secara langsung saat siswa melakukan peminjaman buku, melalui arahan wali kelas, serta melalui pengumuman yang dipasang di area perpustakaan.

Sebagian pemustaka menyatakan bahwa keberadaan aturan dan sanksi membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengelola waktu pengembalian buku. Mereka merasa terdorong untuk menghindari keterlambatan karena adanya denda atau pembatasan layanan. Namun, ada juga beberapa siswa yang mengaku pernah terlambat karena lupa atau kesibukan tugas sekolah, meskipun mereka tetap

¹⁷ Hasil Wawancara Ibu Fatiah Kepala Perpustakaan Man 2 Kota Banjarmasin pada hari Selasa, 20 januari 2026 Jam 13:00.

memahami bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi yang wajar.

Tujuan dari penerapan dan sosialisasi sanksi administratif ini adalah untuk menegaskan bahwa perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan peminjaman dan ruang baca, tetapi juga memiliki aturan yang harus dipatuhi demi kepentingan bersama. Dengan adanya sanksi, pemustaka diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap koleksi yang dipinjam serta menjaga ketertiban dalam layanan sirkulasi.

Selain penyampaian secara lisan, informasi mengenai tata tertib dan sanksi administratif juga dipasang dalam bentuk banner atau papan pengumuman di lokasi yang mudah terlihat oleh siswa. Pengumuman tersebut memuat ketentuan masa peminjaman, besaran denda keterlambatan, serta bentuk pembatasan layanan yang dapat dikenakan. Seluruh kebijakan ini berlaku bagi siswa di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin dan diterapkan secara konsisten.

Secara umum, tanggapan pemustaka menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif diterima sebagai bagian dari aturan yang wajar di lingkungan sekolah. Meskipun masih terdapat pelanggaran, mayoritas siswa menyadari bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kedisiplinan serta menjaga kelancaran layanan perpustakaan agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh pemustaka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Perpustakaan Man 2 Kota Banjarmasin, Ibu A mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam mendukung efektivitas penerapan sanksi administratif adalah dengan melakukan sosialisasi aturan secara terbuka dan berkelanjutan kepada seluruh pemustaka di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Informasi

mengenai tata tertib, batas waktu peminjaman, serta konsekuensi keterlambatan disampaikan secara langsung saat siswa melakukan peminjaman buku maupun melalui pengarahan dari pustakawan dan wali kelas. Dengan demikian, siswa dapat memahami aturan sebelum melakukan pelanggaran.

Selain itu, perpustakaan juga memasang pengumuman tertulis berupa tata tertib dan ketentuan sanksi di area yang mudah terlihat, seperti di dekat meja layanan sirkulasi. Strategi ini bertujuan agar akses informasi mengenai aturan dapat diketahui secara jelas dan menyeluruh oleh seluruh siswa. Dengan keterbukaan informasi tersebut, penerapan sanksi tidak terkesan mendadak atau sepihak, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah disepakati bersama.

Pihak perpustakaan juga memberikan ruang komunikasi kepada pemustaka apabila terdapat kendala, misalnya keterlambatan karena alasan tertentu. Melalui komunikasi langsung antara siswa dan pustakawan, permasalahan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendengarkan masukan serta memahami kondisi siswa guna perbaikan layanan ke depannya.

Dengan strategi sosialisasi dan komunikasi yang terbuka tersebut, penerapan sanksi administratif di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kedisiplinan pemustaka secara berkelanjutan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pihak Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi aturan dan tata tertib secara berkelanjutan kepada siswa. Informasi mengenai batas waktu peminjaman, ketentuan denda, serta bentuk pembatasan layanan disampaikan secara langsung oleh pustakawan saat proses peminjaman maupun melalui koordinasi dengan wali kelas. Dengan cara ini, siswa diharapkan memahami aturan sebelum melakukan pelanggaran.

¹⁸ Hasil Wawancara Ibu A Puatakawan pada hari Selasa, 20 Januari 2026 Jam 14:00.

Selain sebagai bentuk penyampaian informasi, komunikasi antara pustakawan dan pemustaka juga menjadi sarana interaksi dua arah. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan apabila mengalami keterlambatan atau kendala tertentu. Melalui pendekatan ini, pihak perpustakaan tidak hanya menegakkan sanksi secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek edukatif dan pembinaan. Masukan serta tanggapan dari siswa menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan hasil observasi dari aspek strategi, peneliti mengamati bahwa pengelola perpustakaan berupaya menjaga konsistensi penerapan aturan dengan memasang tata tertib dan ketentuan sanksi pada papan pengumuman di area yang mudah terlihat. Selain itu, pencatatan pelanggaran dilakukan secara sistematis untuk memantau tingkat keterlambatan dan kepatuhan pemustaka. Koordinasi dengan pihak sekolah juga menjadi langkah penting dalam mendukung penegakan disiplin, sehingga kebijakan perpustakaan selaras dengan pembinaan karakter siswa di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin.

Strategi penerapan sanksi secara bertahap mulai dari teguran lisan hingga pembatasan layanan serta pendekatan yang komunikatif dan persuasif menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran siswa. Dengan penerapan yang konsisten dan transparan, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan layanan sirkulasi yang lebih tertib serta membentuk budaya disiplin di lingkungan perpustakaan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat serta dampak yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Administratif di perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, Ibu fatiah mengatakan bahwa:

“Faktor yang mendukung penerapan sanksi administratif adalah adanya tata tertib yang jelas dan terstruktur, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Aturan mengenai batas waktu peminjaman, keterlambatan pengembalian, serta bentuk sanksi telah ditetapkan secara tertulis sehingga memudahkan pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kerja sama dengan wali kelas dan bagian kesiswaan turut memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, karena pembinaan kedisiplinan siswa menjadi tanggung jawab bersama di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kesadaran sebagian besar siswa terhadap pentingnya disiplin dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Setelah penerapan sanksi dilakukan secara konsisten, banyak siswa yang menjadi lebih tertib dalam mengembalikan buku tepat waktu dan lebih berhati-hati dalam menjaga koleksi agar tidak rusak atau hilang. Penerapan sanksi yang dilakukan secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pembatasan layanan mampu memberikan efek jera sekaligus pembinaan.”¹⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka, khususnya di lingkungan sekolah yang menuntut pembentukan karakter tanggung jawab. Di tengah berbagai kesibukan siswa dan tantangan kedisiplinan, keberadaan aturan yang jelas disertai sanksi bertahap mampu mendorong siswa untuk lebih tertib dalam mengembalikan buku dan menjaga koleksi perpustakaan. Penerapan sanksi seperti teguran, denda keterlambatan, hingga pembatasan layanan terbukti memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran siswa terhadap kewajiban mereka.

¹⁹ Hasil Wawancara Ibu Fatiah Kepala Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin pada hari Selasa, 20 february 2026 Jam 13:00.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah masih adanya siswa yang kurang disiplin karena faktor lupa, kesibukan tugas, atau kurangnya kesadaran pribadi. Selain itu, sistem pengingat yang masih bersifat manual menjadi tantangan tersendiri dalam meminimalisir keterlambatan. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk notifikasi otomatis juga memengaruhi optimalisasi penerapan sanksi.

Di sisi lain, dukungan dari pihak sekolah dan koordinasi dengan wali kelas menjadi faktor penting dalam memperkuat kebijakan ini. Lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin yang menjunjung pembinaan karakter turut membantu menciptakan keselarasan antara aturan perpustakaan dan budaya disiplin sekolah. Meskipun demikian, penerapan sanksi tetap memerlukan pendekatan komunikatif dan evaluasi berkelanjutan agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan membangun kesadaran jangka panjang pada pemustaka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pustakawan Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, Bapak A mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung utama adalah adanya tata tertib yang sudah tersusun dengan jelas dan dipahami oleh siswa. “Aturan peminjaman di sini sudah jelas, berapa hari boleh pinjam, kapan harus dikembalikan, dan apa konsekuensinya kalau terlambat. Jadi anak-anak sebenarnya sudah tahu dari awal,” ujarnya. Selain itu, pencatatan administrasi peminjaman yang rapi juga membantu pustakawan memantau siapa saja yang terlambat dan berapa lama keterlambatannya.

Faktor pendukung lainnya adalah kerja sama dengan pihak sekolah. Jika ada siswa yang terlambat cukup lama atau belum menyelesaikan kewajibannya, pustakawan bisa berkoordinasi dengan wali kelas atau bagian kesiswaan. “Karena ini lingkungan sekolah, jadi kita tidak berjalan sendiri. Kalau perlu bantuan, biasanya wali kelas ikut mengingatkan,” jelasnya. Dukungan tersebut membuat penerapan sanksi menjadi lebih efektif.

Namun demikian, ada juga faktor penghambat yang dihadapi. Salah satunya adalah masih adanya siswa yang kurang disiplin karena lupa atau

terlalu sibuk dengan tugas sekolah. “Kadang mereka bukan sengaja, tapi memang lupa atau bukunya masih dipakai buat tugas,” katanya. Selain itu, sistem pengingat masih dilakukan secara manual, sehingga belum ada notifikasi otomatis yang bisa langsung mengingatkan siswa sebelum jatuh tempo.

Dari segi dampak, penerapan sanksi administratif dinilai cukup berpengaruh terhadap perubahan perilaku siswa. “Sekarang sudah jauh lebih tertib dibanding dulu. Anak-anak jadi lebih hati-hati kalau pinjam buku, takut kena denda atau tidak boleh pinjam lagi,” ungkapnya. Tingkat keterlambatan memang belum hilang sepenuhnya, tetapi jumlahnya mulai berkurang dan koleksi lebih cepat kembali ke rak sehingga bisa dimanfaatkan siswa lain.

Di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin, penerapan sanksi ini tidak hanya berdampak pada kelancaran layanan perpustakaan, tetapi juga ikut membentuk sikap tanggung jawab siswa. Dengan pendekatan yang tidak hanya tegas tetapi juga komunikatif, kebijakan ini diharapkan dapat terus meningkatkan budaya disiplin di perpustakaan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, ditemukan beberapa faktor yang mendukung penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Salah satu faktor utamanya adalah adanya aturan yang jelas dan sudah disosialisasikan sejak awal kepada siswa. “Di sini tata tertibnya sudah ada, jadi anak-anak tahu berapa lama boleh meminjam buku dan apa akibatnya kalau terlambat,” beliau menjelaskan.

Selain itu, sistem pencatatan peminjaman yang rapi juga menjadi pendukung penting. Setiap peminjaman dan pengembalian dicatat dengan tertib, sehingga pustakawan bisa langsung mengetahui jika ada keterlambatan. “Data peminjaman itu tercatat, jadi kalau ada yang lewat dari batas waktu, langsung kelihatan,” katanya. Hal ini memudahkan dalam penerapan sanksi tanpa harus mencari-cari data terlebih dahulu.

Dukungan dari pihak sekolah juga sangat membantu. Jika ada siswa yang

²⁰ Hasil Wawancara bapak A pustakawan MAN 2 Kota Banjarmasin pada hari kamis, 22 januari 2026 Jam 14:00.

cukup lama belum mengembalikan buku, pustakawan bisa berkoordinasi dengan wali kelas atau bagian kesiswaan. Menurut beliau, “Karena ini satu lingkungan sekolah, jadi kita saling bantu. Biasanya wali kelas ikut mengingatkan siswanya.” Kerja sama ini membuat penerapan aturan menjadi lebih efektif dan tidak hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan semata.

Namun, ada juga beberapa kendala yang dihadapi. Masih ada siswa yang terlambat karena lupa atau terlalu sibuk dengan tugas. “Kadang mereka bukan tidak mau mengembalikan, tapi memang lupa atau bukunya masih dipakai untuk tugas,” ujarnya. Selain itu, belum adanya sistem pengingat otomatis juga menjadi hambatan kecil, karena semua pengingat masih dilakukan secara manual.

Meski begitu, dampaknya sudah mulai terlihat. Di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin, siswa sekarang lebih berhati-hati dalam meminjam buku. Tingkat keterlambatan berkurang dan pengembalian buku menjadi lebih tertib dibanding sebelumnya. “Sekarang anak-anak sudah mulai sadar. Kalau sudah dekat jatuh tempo, biasanya mereka datang sendiri untuk mengembalikan,” tutup beliau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemustaka Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, siswa Ahmad mengatakan bahwa:

“Kadang saya terlambat kembalikan buku soalnya lupa tanggalnya, Kak. Apalagi kalau lagi banyak tugas, bukunya masih kepakai terus jadi belum sempat dikembalikan dan mencatat tanggal jatuh tempo. Biasanya cuma ingat-ingat aja, jadi pas lewat baru sadar ternyata sudah telat,” ujarnya sambil tertawa kecil.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa selaku pemustaka di MAN 2

²¹ Hasil Wawancara Ahmad Pemustaka perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin pada hari rabu, februari 2026 Jam 14:00.

Kota Banjarmasin, diketahui bahwa sebagian besar siswa memahami adanya aturan dan sanksi administratif di perpustakaan. Mereka menyadari bahwa setiap keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.

Beberapa siswa mengaku pernah mengalami keterlambatan. Salah satu siswa mengatakan, “Kadang terlambat karena lupa tanggal kembali, apalagi kalau lagi banyak tugas.” Siswa lain juga menyampaikan bahwa biasanya mereka tidak mencatat tanggal jatuh tempo, sehingga baru menyadari setelah melewati batas waktu pengembalian.

Meski demikian, para siswa menilai bahwa sanksi yang diberikan masih dalam batas wajar dan bersifat mendidik. Mereka merasa aturan tersebut membuat mereka lebih berhati-hati saat meminjam buku.

B. Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan ini memaparkan dari data penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan kepala perpustakaan dan pemustaka di perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. Peneliti memfokuskan ekstraksi data pada interaksi antara pustakawan dan Pemustaka guna membedah dinamika efektivitas sanksi administratif dalam memitigasi Perilaku Indisipliner agar meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu.

1. Efektifitas Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pemustaka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan, diketahui bahwa Berdasarkan temuan peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, diperoleh gambaran bahwa penerapan sanksi administratif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kedisiplinan siswa. Sanksi yang diberikan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban pengembalian koleksi tepat waktu. Dari hasil observasi, terlihat bahwa setelah aturan diterapkan secara konsisten, tingkat keterlambatan pengembalian buku mulai menurun dan siswa menjadi lebih berhati-hati dalam meminjam koleksi.

Hasil wawancara dengan pengelola perpustakaan menunjukkan bahwa tata tertib peminjaman telah disosialisasikan kepada seluruh siswa. Lingkungan sekolah yang terkontrol memudahkan koordinasi dengan wali kelas apabila terdapat siswa yang terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif dilakukan secara sistematis dan didukung oleh pihak sekolah.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat *Ibrahim Bafadal* dalam buku *Manajemen Perpustakaan Sekolah*²², yang menyatakan bahwa tata tertib perpustakaan dan penerapan sanksi yang konsisten merupakan bagian penting dari manajemen layanan untuk menjaga kedisiplinan pemustaka serta kelancaran sirkulasi koleksi. Sanksi yang bersifat edukatif dapat membentuk kebiasaan tertib dan tanggung jawab pada peserta didik.

²²Ibrahim Bafadal dalam buku *Manajemen Perpustakaan Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 112–115

Selain itu, menurut *Sulistyo-Basuki* dalam buku *Pengantar Ilmu Perpustakaan*²³, “pengelolaan layanan sirkulasi memerlukan aturan yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan agar koleksi dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh pemustaka. Keterlambatan pengembalian yang tidak ditindaklanjuti akan berdampak pada terhambatnya akses informasi bagi pengguna lain”.

Dalam perspektif manajemen peserta didik, *Mulyasa* dalam buku *Manajemen Peserta Didik*²⁴, “menjelaskan bahwa penegakan aturan yang konsisten dan adil dapat membantu membentuk karakter disiplin siswa serta menumbuhkan kesadaran tanggung jawab terhadap kewajiban akademik.”

Demikian, berdasarkan hasil penelitian di MAN 2 Kota Banjarmasin dan didukung oleh teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Meskipun masih terdapat kendala seperti kelalaian siswa dan keterbatasan sistem pengingat, pelaksanaan sanksi yang konsisten dan bersifat mendidik terbukti mampu membentuk perilaku yang lebih tertib di lingkungan perpustakaan sekolah.

2. Proses Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pemustaka yang Melanggar Aturan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terlihat bahwa penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hukuman atas keterlambatan pengembalian buku, tetapi lebih sebagai upaya

²³Sulistyo-Basuki dalam buku *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 7.34–7.36

²⁴Mulyasa dalam buku *Manajemen Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 98–

pembentukan sikap disiplin siswa. Dari keterangan pengelola, aturan peminjaman telah disampaikan sejak awal, baik saat orientasi maupun ketika siswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi didahului dengan pemberian pemahaman, sehingga siswa mengetahui konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Secara praktik, pengelolaan layanan sirkulasi dilakukan melalui pencatatan yang tertib. Setiap transaksi peminjaman dan pengembalian dicatat sehingga keterlambatan dapat diketahui dengan jelas. Apabila terdapat pelanggaran, pustakawan memberikan teguran dan dalam kondisi tertentu berkoordinasi dengan wali kelas. Kerja sama ini memperlihatkan bahwa penerapan sanksi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembinaan sekolah secara keseluruhan.

Demikian, dari hasil pengamatan peneliti, efektivitas penerapan sanksi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesadaran siswa yang belum merata menjadi salah satu tantangan. Sebagian siswa masih menganggap keterlambatan sebagai hal biasa selama belum ditegur. Selain itu, keterbatasan tenaga pengelola dan belum adanya sistem pengingat otomatis juga membuat pengawasan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sanksi administratif tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan sarana.

Secara teoritis, kondisi tersebut sejalan dengan pendapat *Sutarno* NS dalam *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*²⁵, yang menjelaskan

²⁵Sutarno NS Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 132–134

bahwa “ketertiban layanan perpustakaan sangat ditentukan oleh kejelasan aturan, ketepatan administrasi, dan konsistensi dalam penegakan tata tertib. Tanpa konsistensi, aturan hanya akan menjadi formalitas”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wiji Suwarno dalam Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis²⁶, bahwa “peraturan perpustakaan berfungsi sebagai alat pembinaan perilaku pemustaka. Sanksi yang diterapkan secara proporsional dan adil dapat menumbuhkan tanggung jawab, sedangkan penerapan yang tidak konsisten justru dapat menurunkan wibawa aturan tersebut.”

Dari sudut pandang manajemen pendidikan, *Kompri* dalam *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik*²⁷, menyatakan bahwa pembentukan disiplin peserta didik harus dilakukan melalui kombinasi antara sosialisasi aturan, pengawasan, dan penerapan konsekuensi yang adil. Disiplin yang terbentuk karena kesadaran akan lebih bertahan dibandingkan disiplin yang muncul karena rasa takut terhadap hukuman.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi administratif di MAN 2 Kota Banjarmasin telah berjalan dalam kerangka yang cukup terstruktur dan mendidik. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan perbedaan tingkat kesadaran siswa, penerapan aturan yang konsisten dan didukung oleh pihak sekolah menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka. Ke depan, penguatan sistem administrasi dan peningkatan kesadaran siswa menjadi langkah penting agar efektivitas sanksi dapat semakin optimal.

²⁶ Wiji Suwarno Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 165–168

²⁷ Kompri Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 212–215

3. Strategi Pustakawan Terhadap Upaya Penerapan Sanksi Administratif

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, strategi pustakawan dalam menerapkan sanksi administratif dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur, edukatif, dan kolaboratif. Pustakawan tidak serta-merta menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi lebih dahulu membangun pemahaman siswa terhadap tata tertib perpustakaan. Sosialisasi aturan peminjaman dan pengembalian buku disampaikan pada awal tahun ajaran serta saat proses pendaftaran anggota. Langkah ini bertujuan agar siswa mengetahui batas waktu peminjaman dan konsekuensi administratif apabila terjadi pelanggaran.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pendapat *Sutarno NS* dalam *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*,²⁸ yang menegaskan bahwa “tata tertib perpustakaan harus disosialisasikan secara jelas dan diterapkan secara konsisten agar mampu menciptakan ketertiban layanan sirkulasi. Tanpa sosialisasi yang memadai, aturan tidak akan memiliki daya kontrol yang efektif terhadap perilaku pemustaka.”

Dalam praktiknya, pustakawan menerapkan sistem pencatatan sirkulasi secara tertib sebagai dasar pengawasan. Setiap peminjaman dan pengembalian koleksi dicatat sehingga keterlambatan dapat teridentifikasi secara objektif. Apabila terjadi pelanggaran, pustakawan terlebih dahulu memberikan teguran lisan secara personal sebelum menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tegas. Strategi ini menunjukkan adanya pendekatan persuasif yang bertujuan

²⁸ Sutarno NS *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 130–135

membangun kesadaran, bukan sekadar efek jera.

Hal ini selaras dengan pandangan *Wiji Suwarno* dalam *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis*²⁹, yang menyatakan bahwa peraturan perpustakaan berfungsi sebagai instrumen pembinaan perilaku pemustaka. Sanksi yang diterapkan secara proporsional dan edukatif akan lebih efektif dalam menumbuhkan tanggung jawab dibandingkan pendekatan yang bersifat represif.

Selain itu, strategi pustakawan juga melibatkan koordinasi dengan wali kelas atau pihak kesiswaan apabila terdapat siswa yang berulang kali terlambat mengembalikan buku. Pendekatan kolaboratif ini memperlihatkan bahwa penerapan sanksi administratif menjadi bagian dari sistem pembinaan sekolah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, disiplin tidak hanya dibangun melalui regulasi perpustakaan, tetapi juga melalui dukungan lingkungan pendidikan.

Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil penelitian *Riski Tri Wismanawati dan Aan Permana* dalam artikel berjudul *Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka terhadap Kedisiplinan Pemustaka*³⁰, Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif memiliki pengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan pemustaka, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan dan tingkat kesadaran pengguna.

Demikian pula dalam penelitian *Armiati dan Komala Zuha*, *Efektivitas*

²⁹ Wiji Suwarno *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 156–160

³⁰Riski Tri Wismanawati dan Aan Permana *Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka terhadap Kedisiplinan Pemustaka* (Jurnal Ilmu Perpustakaan, Universitas Diponegoro, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 1–10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3100>).

*Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kedisiplinan Pemustaka*³¹, ditegaskan bahwa sosialisasi aturan dan komunikasi yang baik antara pengelola dan pemustaka merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan penerapan sanksi.

Secara kritis dapat dipahami bahwa strategi pustakawan di MAN 2 Kota Banjarmasin telah mengarah pada pendekatan yang cukup komprehensif, yakni menggabungkan sosialisasi, administrasi tertib, pendekatan persuasif, serta kolaborasi dengan pihak sekolah. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor teknis seperti keterbatasan sistem pengingat otomatis dan jumlah tenaga pengelola. Oleh karena itu, penguatan sistem berbasis teknologi serta peningkatan kesadaran internal siswa menjadi langkah strategis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif di masa mendatang.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat serta dampak yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Administratif di perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, penerapan sanksi administratif menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi tingkat kedisiplinan pemustaka. Sanksi administratif bukan semata-mata hukuman, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen layanan

³¹Armiaati dan Komala Zuha, Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kedisiplinan Pemustaka (Jurnal IPI, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 85–94, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/3838>).

perpustakaan yang bertujuan menanamkan tanggung jawab siswa dalam pengembalian koleksi tepat waktu.

a. Faktor Pendukung

1) Tata Tertib yang Jelas dan Terinternalisasi

Pustakawan secara sadar menyampaikan aturan peminjaman, batas waktu pengembalian dan konsekuensi sanksi sejak awal siswa menjadi anggota. Langkah ini menguatkan landasan kedisiplinan sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini sesuai dengan pendapat *Sutarno NS* dalam *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik* yang menyatakan bahwa kejelasan tata tertib merupakan fondasi penting dalam pengendalian layanan sirkulasi perpustakaan.³² prinsip keadilan dalam penegakan aturan ini didukung oleh nilai-nilai dalam Surah Al-Ma'idah ayat 49 yang menekankan pentingnya memutuskan perkara secara adil, objektif, dan konsisten tanpa pengaruh hawa nafsu. Ayat ini memberikan landasan etis bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan harus didasarkan pada ketetapan yang jelas dan bukti objektif, seperti rekaman data sirkulasi yang akurat, sehingga tidak ada unsur kesewenang-wenangan dari pihak pustakawan dan juga Pemustaka. Peneliti memberikan Analogi sederhananya, Indonesia sebagai negara hukum memiliki Undang-Undang yang berfungsi sebagai pedoman hidup bersama demi terciptanya ketertiban. Begitu pula dengan perpustakaan, tata tertib yang ada adalah "undang-undang" kecil yang wajib ditaati oleh seluruh pemustaka guna menjamin keadilan akses terhadap ilmu pengetahuan. Jika dalam sebuah negara pelanggaran terhadap Undang-Undang akan mengganggu stabilitas publik, maka

³²Sutarno NS Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hlm. 132–134

ketidapatuhan di perpustakaan seperti keterlambatan pengembalian buku atau kerusakan koleksi akan merampas hak pemustaka lain untuk mendapatkan sumber informasi yang sama. Oleh karena itu, ketaatan pada aturan perpustakaan bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan wujud penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam lingkungan akademik. Pada akhirnya, kejelasan tata tertib ini berfungsi meminimalisir kesenjangan antara aturan tertulis dan perilaku aktual di lapangan, sehingga tercipta budaya layanan yang tidak hanya tertib, tetapi juga profesional dan bertanggung jawab.

2) Pencatatan Administrasi yang Tertib

Layanan sirkulasi di perpustakaan dicatat dengan sistematis sehingga keterlambatan dapat teridentifikasi secara objektif dan sanksi diberikan berdasarkan data nyata. Menurut *Wiji Suwarno* dalam *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis*, pengelolaan sirkulasi yang rapi merupakan kunci untuk memastikan manfaat koleksi bagi seluruh pengguna dan legitimasi pemberian sanksi.³³

menunjukkan bahwa layanan sirkulasi memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban penggunaan koleksi. Apabila pencatatan dilakukan secara konsisten, maka perpustakaan dapat mengontrol peredaran bahan pustaka, mengurangi risiko keterlambatan pengembalian, serta meningkatkan tanggung jawab pemustaka terhadap koleksi yang dipinjam. Sebaliknya, apabila pencatatan layanan tidak dilakukan dengan baik, maka akan sulit bagi pustakawan untuk menilai pelanggaran secara tepat dan penerapan sanksi berpotensi menjadi tidak

³³Wiji Suwarno *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan: Sebuah Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 158–160).

konsisten, Analogi dari pentingnya pencatatan ini dapat kita lihat pada sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Negara memiliki basis data seperti KTP elektronik atau Kartu Keluarga untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara terpenuhi secara tepat sasaran. Jika administrasi negara kacau, maka penyaluran bantuan atau penegakan hukum akan salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan. Begitu pula di perpustakaan; buku adalah aset negara, dan pencatatan sirkulasi adalah "sensus" harian yang memastikan aset tersebut kembali tepat waktu untuk digunakan oleh orang lain. Kerapian administrasi ini mencerminkan ketaatan terhadap "Undang-Undang" intern perpustakaan, di mana data menjadi hakim yang adil bagi setiap pemustaka.

Dalam konteks penerapan sanksi administratif, sistem sirkulasi yang terstruktur juga membantu pustakawan dalam menentukan jenis sanksi secara bertahap. Pemustaka yang terlambat mengembalikan buku dapat terlebih dahulu diberikan teguran lisan, kemudian teguran tertulis, pembatasan hak peminjaman, hingga pemberian denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Prosedur bertahap ini menunjukkan bahwa sanksi tidak diberikan secara langsung sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk pembinaan agar pemustaka lebih disiplin. Dengan adanya data sirkulasi yang jelas, pustakawan dapat melihat apakah pelanggaran yang dilakukan bersifat pertama kali atau berulang, sehingga sanksi yang diberikan menjadi lebih proporsional.

Selain itu, pencatatan layanan sirkulasi juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi perpustakaan dalam melihat efektivitas penerapan sanksi administratif. Data keterlambatan pengembalian buku, jumlah pelanggaran, serta perubahan perilaku

pemustaka dapat dianalisis untuk mengetahui apakah sanksi yang diterapkan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kedisiplinan. Jika tingkat pelanggaran menurun, maka dapat dikatakan bahwa sanksi administratif berjalan efektif. Namun apabila pelanggaran masih sering terjadi, maka perpustakaan perlu melakukan perbaikan, baik dalam bentuk sosialisasi aturan, penyesuaian jenis sanksi, maupun peningkatan pengawasan layanan.

Dalam penelitian ini, penerapan sanksi administratif di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin juga didukung oleh pencatatan layanan sirkulasi yang dilakukan oleh pustakawan. Setiap keterlambatan pengembalian buku dicatat sebagai bagian dari administrasi layanan, kemudian dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Sistem ini membantu menciptakan penerapan sanksi yang lebih objektif dan tidak bersifat subjektif. Pemustaka yang melanggar aturan menerima konsekuensi berdasarkan data yang tercatat, sehingga sanksi yang diberikan dapat diterima secara adil. Demikian, layanan sirkulasi yang dicatat secara sistematis memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penerapan sanksi administratif. Pencatatan tersebut tidak hanya membantu mengontrol peredaran koleksi, tetapi juga menjadi dasar dalam menegakkan aturan secara konsisten. Melalui pengelolaan sirkulasi yang tertib, perpustakaan dapat menciptakan layanan yang lebih profesional, meningkatkan kedisiplinan pemustaka, serta menjaga ketersediaan koleksi agar dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh pengguna perpustakaan.

3) Pendekatan Edukatif dalam Penerapan Sanksi

Ketika siswa terlambat, pustakawan umumnya memberikan teguran lisan atau penjelasan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tegas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sanksi tidak bersifat represif, tetapi bertujuan meningkatkan kesadaran. Studi *Riski Tri Wismanawati & Aan Permana, Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka terhadap Kedisiplinan Pemustaka* menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan secara konsisten dengan pendekatan persuasif dapat meningkatkan kedisiplinan pemustaka.³⁴

“Pendekatan edukatif dalam penerapan sanksi menekankan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemustaka.” Dalam praktik layanan perpustakaan, pendekatan ini terlihat ketika siswa yang terlambat mengembalikan buku tidak langsung dikenai sanksi tegas, melainkan terlebih dahulu diberikan teguran lisan serta penjelasan mengenai pentingnya mematuhi batas waktu peminjaman. Pustakawan memberikan pemahaman bahwa keterlambatan pengembalian koleksi dapat menghambat pemustaka lain yang membutuhkan buku tersebut serta mengganggu kelancaran layanan sirkulasi. Melalui penjelasan ini, siswa diharapkan memahami bahwa aturan perpustakaan dibuat untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan koleksi secara bersama.

³⁴Riski Tri Wismanawati dan Aan Permana artikel berjudul Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka terhadap Kedisiplinan Pemustaka (Jurnal Ilmu Perpustakaan, Universitas Diponegoro, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 1–10, tersedia di: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3100>).

Pendekatan edukatif juga mencerminkan bahwa penerapan sanksi dilakukan melalui proses pembinaan yang bertahap. Pada tahap awal, pustakawan memberikan pengingat dan arahan agar siswa segera mengembalikan koleksi yang dipinjam. Jika pelanggaran kembali terjadi, maka diberlakukan sanksi administratif yang lebih tegas seperti pembatasan hak peminjaman atau denda keterlambatan. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak menempatkan sanksi sebagai bentuk tindakan represif, melainkan sebagai bagian dari proses pendidikan kedisiplinan. Pemustaka diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku sebelum menerima konsekuensi yang lebih berat. Dengan demikian, sanksi tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membantu membentuk kebiasaan disiplin secara berkelanjutan. Jika kita melihat dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini dapat dianalogikan seperti sistem peringatan dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) atau sistem poin pelanggaran lalu lintas. Di banyak negara maju, sebelum seseorang dicabut hak mengemudinya secara permanen, mereka diberikan peringatan atau "poin pelanggaran" yang disertai dengan pembinaan atau kursus singkat mengenai keselamatan berkendara. Tujuannya bukan semata-mata untuk melarang orang mengemudi, tetapi untuk memastikan bahwa pengemudi tersebut sadar akan bahaya yang ia timbulkan bagi orang lain jika ia tidak disiplin. Sama halnya di perpustakaan, teguran dan sanksi denda adalah "poin peringatan" yang bertujuan agar siswa memahami bahwa ketidaktertiban mereka dapat menghambat "lalu lintas" ilmu pengetahuan bagi pemustaka lainnya. Sanksi administratif adalah upaya untuk menyadarkan siswa agar menjadi "pengemudi" yang bertanggung jawab di jalur literasi.

Secara konseptual, pendekatan edukatif dalam penerapan sanksi juga berkaitan dengan fungsi perpustakaan sebagai lembaga pendidikan. Perpustakaan sekolah tidak hanya menyediakan sumber belajar, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan. Melalui pendekatan edukatif, pustakawan berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami pentingnya menjaga fasilitas bersama. Proses ini mendorong siswa untuk tidak hanya mematuhi aturan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena memahami nilai yang terkandung di dalamnya.

Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, pendekatan edukatif terlihat dari kebijakan pustakawan yang memberikan penjelasan kepada siswa yang terlambat mengembalikan buku sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Pustakawan tidak hanya mencatat pelanggaran, tetapi juga memberikan arahan mengenai pentingnya kedisiplinan serta tanggung jawab dalam menggunakan koleksi perpustakaan. Apabila siswa mengulangi pelanggaran, barulah diterapkan sanksi yang lebih tegas sesuai tata tertib yang berlaku. Prosedur ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pembinaan, Pendekatan edukatif juga berperan dalam membangun komunikasi yang positif antara pustakawan dan pemustaka. Teguran yang disampaikan secara persuasif membuat siswa tidak merasa disalahkan secara langsung, melainkan diarahkan untuk memperbaiki kesalahan. Interaksi yang komunikatif ini dapat meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap kebijakan perpustakaan. Pemustaka akan memandang sanksi sebagai bagian dari aturan yang adil dan bertujuan mendidik,

bukan sebagai tindakan yang memberatkan. Kondisi ini berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan serta terciptanya suasana layanan yang lebih kondusif.

4) Dukungan Lingkungan Sekolah

Koordinasi dengan wali kelas atau pihak kesiswaan membantu memperkuat penegakan aturan karena disiplin di perpustakaan menjadi bagian dari pembinaan karakter sekolah secara menyeluruh. *Kompri* dalam *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik* menyatakan bahwa kedisiplinan peserta didik paling efektif apabila dukungan aturan sekolah konsisten termasuk kolaborasi antar unit sekolah.³⁵

Dukungan lingkungan sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sanksi administratif di perpustakaan. Koordinasi dengan wali kelas maupun pihak kesiswaan membantu memperkuat penegakan aturan karena kedisiplinan di perpustakaan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa secara menyeluruh. Ketika pelanggaran yang terjadi di perpustakaan juga diketahui oleh wali kelas, maka siswa akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, aturan perpustakaan tidak hanya berlaku saat siswa berada di ruang perpustakaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah secara umum. dapat dianalogikan seperti Sistem Rekam Jejak (*Credit Score*) dalam dunia perbankan atau keuangan. Dalam sistem tersebut, perilaku ekonomi seseorang di satu lembaga keuangan akan tercatat dan memengaruhi kredibilitasnya di lembaga lain. Jika seseorang tidak disiplin dalam satu urusan,

³⁵Kompri dalam *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 212–215

hal itu akan menjadi catatan bagi sistem secara keseluruhan. Demikian pula di sekolah; ketika perilaku siswa di perpustakaan terhubung dengan catatan kesiswaan atau wali kelas, siswa akan menyadari bahwa "karakter" mereka sedang dipantau secara utuh sebagai satu kesatuan pribadi, bukan hanya sebagai pengunjung perpustakaan. Hal ini menciptakan efek jera yang lebih kuat karena siswa menyadari bahwa ketidakpatuhan di satu sudut sekolah akan mencerminkan profil kedisiplinan mereka secara umum di mata institusi.

Dukungan lingkungan sekolah juga memperlihatkan adanya sinergi antarunit dalam membangun kedisiplinan peserta didik. Perpustakaan sebagai bagian dari sistem pendidikan sekolah memerlukan keterlibatan guru, wali kelas, serta bagian kesiswaan agar penerapan aturan berjalan lebih efektif. Misalnya, ketika siswa berulang kali terlambat mengembalikan buku, pustakawan dapat berkoordinasi dengan wali kelas untuk memberikan pengingat tambahan atau pembinaan secara langsung. Pendekatan ini membuat siswa memahami bahwa kedisiplinan dalam menggunakan perpustakaan merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai peserta didik, bukan hanya kewajiban yang bersifat administratif. Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, dukungan lingkungan sekolah terlihat dari adanya komunikasi antara pustakawan dengan wali kelas atau pihak kesiswaan ketika terjadi pelanggaran yang berulang. Koordinasi ini membantu pustakawan dalam memberikan pembinaan yang lebih efektif kepada siswa. Wali kelas dapat mengingatkan siswa untuk segera mengembalikan buku, sementara pihak kesiswaan dapat memberikan arahan mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah, termasuk aturan perpustakaan. Dengan adanya kerja sama ini,

penerapan sanksi administratif menjadi lebih kuat dan tidak bersifat individual, melainkan didukung oleh sistem sekolah secara menyeluruh.

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran Siswa yang Belum Merata

Siswa yang lupa mencatat tanggal jatuh tempo atau masih menggunakan buku untuk tugas seringkali terlambat mengembalikan bahan perpustakaan. Penelitian *Armiati & Komala Zuha, Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kedisiplinan Pemustaka*,³⁶ menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran pemustaka terhadap aturan menjadi salah. Kesadaran siswa yang belum merata juga berkaitan dengan kebiasaan belajar dan tanggung jawab individu. Siswa yang memiliki kesadaran tinggi cenderung mencatat tanggal pengembalian, mengingat batas waktu peminjaman, serta segera mengembalikan buku setelah selesai digunakan. Sebaliknya, siswa yang kesadarannya masih rendah cenderung mengabaikan batas waktu pengembalian karena fokus pada kebutuhan tugas atau kegiatan lainnya. Perbedaan tingkat kesadaran ini menyebabkan pelanggaran masih terjadi meskipun aturan dan sanksi administratif telah diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap koleksi yang dipinjam.

Dapat dianalogikan seperti Sistem Reservasi Meja di Restoran atau Fasilitas Umum. Bayangkan seseorang memesan tempat untuk durasi dua jam,

³⁶Armiati & Komala Zuha, Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap Kedisiplinan Pemustaka (Jurnal IPI, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 88–90)

namun karena merasa makanannya enak atau pembicaraannya belum selesai, ia enggan beranjak meskipun pelanggan lain sudah mengantre panjang di luar. Meskipun ia membayar, tindakannya menahan fasilitas lebih lama dari kesepakatan awal adalah bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain yang juga memiliki reservasi. Di perpustakaan, "jatuh tempo" adalah batas reservasi ilmu pengetahuan. Mengabaikan tanggal tersebut karena fokus pada tugas pribadi sama saja dengan menahan hak orang lain untuk belajar dari sumber yang sama. Sanksi denda atau administratif lainnya berfungsi sebagai "peringat durasi" agar sirkulasi fasilitas umum tetap berjalan, di Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin, keterlambatan pengembalian buku yang disebabkan oleh lupa tanggal jatuh tempo atau penggunaan buku untuk tugas menunjukkan bahwa kesadaran siswa terhadap aturan masih perlu ditingkatkan. Pustakawan biasanya memberikan teguran serta mengingatkan pentingnya mengembalikan buku tepat waktu agar dapat dimanfaatkan oleh siswa lain. Apabila pelanggaran terus berulang, maka diberlakukan sanksi administratif sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan agar siswa lebih memperhatikan kewajiban mereka dalam menggunakan fasilitas perpustakaan sehingga kedisiplinan dalam penggunaan layanan perpustakaan dapat meningkat secara bertahap.

2) Belum Adanya Sistem Peringat Otomatis

Pemberitahuan jatuh tempo masih dilakukan secara manual oleh pustakawan. Tidak adanya sistem otomasi seperti notifikasi melalui SMS atau aplikasi perpustakaan digital membuat pengawasan keterlambatan kurang optimal.

Menurut *Sulistyo-Basuki* dalam *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, teknologi perpustakaan seperti sistem otomasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi layanan sirkulasi.³⁷ Pemberitahuan jatuh tempo yang masih dilakukan secara manual oleh pustakawan menyebabkan pengawasan terhadap keterlambatan pengembalian bahan pustaka menjadi kurang optimal, Peningkat biasanya hanya disampaikan secara lisan saat proses peminjaman atau ketika siswa datang ke perpustakaan. Cara ini memiliki keterbatasan karena tidak semua siswa dapat mengingat tanggal pengembalian, terutama ketika mereka memiliki banyak tugas sekolah. Akibatnya, keterlambatan sering terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurangnya pengingat yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemberitahuan manual belum mampu menjangkau seluruh pemustaka secara efektif.

Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemberitahuan jatuh tempo. Media sosial yang umum digunakan siswa, seperti grup kelas atau akun resmi perpustakaan sekolah, dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pengingat pengembalian buku. Pustakawan dapat mengirimkan daftar siswa yang mendekati jatuh tempo atau memberikan pengumuman secara berkala mengenai batas waktu pengembalian. Penggunaan media sosial ini lebih efektif karena informasi dapat diterima siswa secara cepat dan langsung melalui perangkat yang sering mereka gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan media sosial juga dapat meningkatkan komunikasi antara pustakawan dan siswa. Melalui media sosial,

³⁷Sulistyo-Basuki dalam *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011, hlm. 7.35–7.37).

pustakawan tidak hanya memberikan pengingat, tetapi juga dapat menyampaikan informasi mengenai tata tertib perpustakaan, jadwal layanan, serta konsekuensi keterlambatan pengembalian buku. Interaksi yang lebih aktif ini membantu menumbuhkan kesadaran siswa terhadap aturan perpustakaan. Selain itu, siswa juga dapat menanyakan kembali tanggal jatuh tempo atau menginformasikan apabila mereka masih membutuhkan buku untuk tugas, sehingga pustakawan dapat memberikan arahan yang sesuai

3) Keterbatasan Tenaga Pengelola

Salah satu pustakawan menyatakan bahwa ketika jumlah pengunjung ramai, fokus mereka terbagi antara melayani peminjaman, pengembalian, pencatatan serta pengawasan pelanggaran sehingga sanksi sering kali tidak dapat diterapkan segera,

Keterbatasan tenaga pengelola menjadi salah satu kendala dalam penerapan sanksi administratif secara optimal di perpustakaan. Ketika jumlah pengunjung meningkat, pustakawan harus membagi perhatian antara berbagai tugas layanan, seperti melayani peminjaman, pengembalian, pencatatan administrasi, serta pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan fokus kerja menjadi terbagi, sehingga penerapan sanksi administratif tidak selalu dapat dilakukan secara langsung. Dalam situasi ramai, pustakawan cenderung memprioritaskan kelancaran layanan sirkulasi terlebih dahulu agar proses peminjaman dan pengembalian tetap berjalan tertib. Akibatnya, beberapa pelanggaran baru ditindak setelah kondisi layanan kembali kondusif.

Keterbatasan tenaga pengelola juga berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap perilaku pemustaka. Idealnya, pustakawan tidak hanya bertugas melayani administrasi, tetapi juga melakukan monitoring terhadap kepatuhan pemustaka terhadap tata tertib. Namun ketika jumlah petugas terbatas, fungsi pengawasan menjadi kurang maksimal. Pelanggaran seperti keterlambatan pengembalian, penggunaan koleksi yang tidak sesuai prosedur, atau ketidakpatuhan terhadap aturan ruang baca terkadang tidak langsung teridentifikasi. Kondisi ini dapat menyebabkan penerapan sanksi menjadi tidak konsisten, karena pustakawan tidak selalu dapat mencatat setiap pelanggaran yang terjadi secara real time.

Sistem Pengawasan di Kolam Renang Umum yang Ramai. Seorang penjaga pantai (lifeguard) mungkin sangat kompeten, namun jika ia harus mengawasi ratusan perenang sendirian sambil merangkap sebagai petugas tiket, maka fokusnya akan terpecah. Pelanggaran kecil seperti pengunjung yang melompat di area berbahaya mungkin tidak akan terlihat dan tidak mendapatkan teguran segera. Akibatnya, pengunjung merasa bahwa aturan tersebut "longgar" dan bisa dilanggar kapan saja tanpa konsekuensi. Di perpustakaan, ketika pustakawan terlalu sibuk mengurus administrasi buku tanpa sempat memberikan edukasi sanksi, maka "standar keselamatan" kedisiplinan akan menurun, dan siswa cenderung menyepelekan batas waktu pengembalian karena merasa pengawasan sedang lemah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan layanan yang lebih terstruktur serta dukungan lingkungan sekolah agar penerapan sanksi tetap konsisten dan mampu meningkatkan kedisiplinan pemustaka secara berkelanjutan.

4) Persepsi Siswa terhadap Sanksi Administratif

Beberapa siswa merasa kurang nyaman saat dikenakan sanksi, meskipun mereka mengetahui aturan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap internal pemustaka Terhadap aturan masih perlu dibentuk secara lebih konsisten melalui pendekatan pembiasaan disiplin. ketidaknyamanan yang dirasakan siswa juga dapat dipengaruhi oleh cara penyampaian sanksi yang kurang komunikatif atau tidak disertai penjelasan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, siswa bisa saja mematuhi aturan, tetapi belum tentu memahami tujuan dari sanksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih membangun, misalnya melalui arahan yang jelas, pembiasaan sikap disiplin, serta komunikasi yang baik antara guru dan siswa. konsistensi dalam penerapan aturan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Jika aturan diterapkan secara tidak merata, siswa dapat merasa bahwa sanksi yang diberikan kurang adil. Hal ini dapat memengaruhi sikap mereka terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu, penerapan aturan yang konsisten dan adil perlu dijaga agar siswa memiliki kepercayaan terhadap sistem yang berlaku di sekolah.